

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR  
DI KECAMATA TEMBALANG, KOTA SEMARANG**

**Oleh :**

**Didik Nugroho, Hesti Lestari, Slamet Santoso**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

**ABSTRACT**

*Research Policy Implementation Help Poor Students in Elementary School District Tembalang a qualitative descriptive study. This study uses the precision of a policy to explain the effectiveness of policy implementation Help Poor Students. The focus of this research that the Policy Implementation Assistance Poor Students in Elementary School District Tembalang using Grindle implementation model to analyze the factors in the implementation of policies that are used to determine the success of the policy implementation process. Informants in this study is from the Education Office of Semarang, UPTD District Tembalang, elementary schools in the District Tembalang, School Committee, Board of Education of Semarang, and Receiving Communities BSM. Research and analysis process begins from the state of education, describe the implementation process by using the appropriateness of the policy to assess the effectiveness and efficiency of policies Help Poor Students. Furthermore, analyzing the factors implementations using Grindle models to be able to see the success of the implementation of the policy Help Poor Students. With so can find out shortcomings in the implementation process so that it can be improved so that the implementation of a policy Help Poor Students can run effectively and efficiently*

***Keywords : Implementation, Policies Help Poor Students, accuracy Policy, Implementation Grindle Models***

## A. Latar Belakang

Produk- produk kebijakan dalam bidang pendidikan merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sebagaimana tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah harus memberikan akses pendidikan pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan

Di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti yang terjabarkan dalam visi pendidikan nasional Indonesia yakni terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif, dan berakhlak mulia. Guna mendukung terwujudnya visi tersebut, maka pendidikan nasional melalui Kementerian Pendidikan Nasional memiliki misi yang harus dilaksanakan yaitu : (1) menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar; (2) mewujudkan sistem pendidikan efektif, efisien, dan bertanggung jawab; (3) mewujudkan pendidikan nasional yang merata dan bermutu.

Kebijakan BSM merupakan bentuk kompensasi dari pemerintah akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang bersumber dari APBN. Berdasarkan Panduan BSM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang

tunai yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin. BSM ini difokuskan untuk membantu siswa miskin untuk dapat mengakses pendidikan.

Berdasarkan Panduan BSM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: (1) menambah dan memperluas jumlah sasaran siswa yang menerima BSM, (2) peningkatan jumlah nominal BSM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin. Dana BSM dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan langsung maupun tidak langsung personal para siswa.

Pemberian dana BSM seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana BSM ini sebagai bentuk perlindungan bagi keluarga miskin agar anak- anak mereka tetap dapat bersekolah. Syarat- syarat yang diperlukan untuk memperoleh dana BSM adalah dengan mendaftarkan diri dengan membawa surat keterangan ketidakmampuan seperti KPS, SKTM, Jamkesmas, Gakin, dan lain-lain.

Kota Semarang masih banyak memiliki keluarga miskin. Besarnya keluarga miskin di kota Semarang sangat berpengaruh terhadap berapa keluarga yang berhak mendapatkan dana BSM. Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang secara keseluruhan jumlah pengaju BSM sebesar 3103 siswa. Pengaju terbesar adalah dengan menggunakan KPS sebesar 1349, SKTM sebesar 861, Jamkesmas/ Jamkeskot sebesar 625, Lain- lain sebesar 246, dan

Gakin sebesar 27. Namun, siswa yang menerima hanya yang memiliki KPS dan terealisasi sebesar 99% (persen).

Di dalam pelaksanaan kebijakan BSM ketersediaan sumberdaya manusia menjadi sangat penting sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kelompok sasaran dengan pelaksana kebijakan. Dengan sumberdaya pelaksana yang tercukupi akan lebih mudah menjangkau kelompok sasaran yang jumlahnya besar. Sumberdaya pelaksana kebijakan BSM secara keseluruhan berjumlah 45 orang, sedangkan jumlah kelompok sasaran berjumlah 3103 orang. Jika pelaksanaan kebijakan dengan kelompok sasaran terjadi kesenjangan yang cukup besar (1:68) itu artinya setiap pelaksana harus memberikan informasi terhadap kelompok sasaran sebanyak 68 orang. Dengan begitu setiap pelaksana harus memiliki kualitas atau kemampuan dalam memahami isi kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, Semarang, dan menganalisis berbagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin

## **C. Kerangka Teori**

### **C.1 Implementasi Kebijakan**

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*

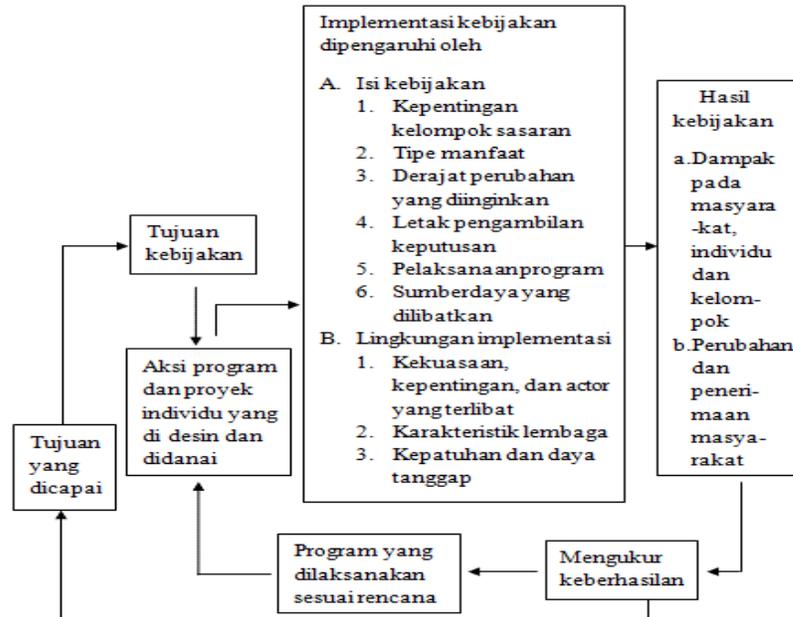
*output*) (dalam Winarno, 2007: 145). Oleh karena itu implementasi kebijakan menjadi sebuah langkah yang paling *urgent* dari sebuah kebijakan. Suatu kebijakan hanya menjadi rencana bagus apabila tidak dijalankan dan akan tersimpan rapi di dalam lemari arsip. Tujuan yang telah dibuat akan menjadi impian belaka saja.

Proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa pendekatan dari kebijakan yang dilaksanakan. Menurut Lester dan Stewart (2000) dalam Agustino (2008: 140) ada beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yaitu *the command and control approach* (pendekatan *top-down*) dan *the market approach* (pendekatan *bottom-up*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

### **C.2 Model Implementasi Grindle**

Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan (*content of policy*) adalah apa yang ada dalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan publik tersebut. Lingkungan kebijakan (*context of implementation*) adalah gambaran mengenai bagaimana konteks politik dan aktivitas administrasi memengaruhi kebijakan publik yang di implementasikan, Grindle, Merilee S (dalam Suwitri, 2009: 86)

**Implementasi sebagai proses politik dan administrasi**



Sumber: Grindle, merilee S (dalam Suwitri, 2009: 86)

**C.3 Implementasi Kebijakan yang Baik**

Pada prinsipnya untuk menilai suatu kebijakan diimplementasikan dengan baik dengan melihat keefektifan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Riant Nugroho (2014: 686) mengemukakan bahwa keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat melalui “lima tepat” yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan, Ketepatan Proses. Ke lima ketepatan dari Riant Nugroho dapat dijadikan indikator bagi penulis untuk menafsirkan keefektifan suatu kebijakan. Dengan begitu penulis dapat mengetahui berbagai problem yang dihadapi dalam implementasi sebuah kebijakan.

**D. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data berupa kata-kata, sumber data tertulis, foto, dan statistik Data hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Lokus penelitian berada di

Sekolah dasar di Kecamatan Tembalang, Semarang.

**E. Pembahasan**

**E.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, Semarang**

**E.1.1 Ketepatan Kebijakan**

Ketepatan kebijakan adalah kebijakan yang telah di buat memuat hal-hal yang memang harus dipecahkan. Suatu kebijakan dirasa tepat jika tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah yang ada, dalam Riant Nugroho (2014: 686). Indikator dari ketepatan ini adalah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, kebijakan bermuatan hal-hal yang dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan, dan kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya

Berdasarkan indikator tersebut kurang optimal yaitu kebijakan bermuatan hal-hal yang dapat

menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Dimana upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan kebijakan BSM adalah proses mendata dan mengusulkan. Selanjutnya proses menyeleksi calon penerima tidak semua siswa miskin yang diusulkan mendapat BSM. Selain itu di dalam penggunaan dana tersebut yang diberikan langsung kepada kelompok sasaran tidak bisa dikendalikan.

Selain itu yang masih belum optimal adalah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Kementerian Pendidikan sebagai agen pelaksana yang bertugas menyeleksi penerima bantuan. Di dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan Dinas Sosial dan BPS mengenai data keluarga miskin sehingga dalam menyeleksi siswa miskin bisa menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Di dalam menyeleksi pemegang kartu KPS lebih menjadi prioritas dalam pemberian BSM, sedangkan dalam pedoman berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

### **E.1.2 Ketepatan Pelaksana**

Ketepatan pelaksana adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Aktor dalam implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah melainkan terdapat lembaga lain yang dapat menjadi pelaksana, dalam Riant Nugroho (2014: 686). Indikator dalam ketepatan pelaksana ini adalah ketepatan aktor pelaksana kebijakan dan ketepatan tugas pelaksana kebijakan.

Indikator yang belum optimal adalah tugas pelaksana kebijakan. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan BSM diberikan pelaksana kebijakan terkait tugas dan tata tertib yang harus dipatuhi pelaksana. Berdasarkan tugas yang diberikan pelaksana tingkat bawah menjadi kurang berfungsi karena penggunaan dana BSM tidak dapat dikendalikan karena pelaksana tingkat bawah tugasnya hanya

melaporkan data, sedangkan untuk siswa yang tidak dapat itu alasannya apa; soal pengelolaan kurang bisa dikendalikan oleh pihak sekolah; dan dananya sudah diambil apa belum tidak tau.

### **E.1.3 Ketepatan Target**

Ketepatan target adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari target kebijakan, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah ketepatan target penerima, target dalam kondisi siap untuk di intervensi, dan intervensi target dalam implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Indikator yang belum optimal adalah ketepatan target penerima dan intervensi kepada target dalam implementasi kebijakan. *Pertama*, target penerima. Di dalam menentukan penerima BSM yang diperuntukkan bagi seluruh siswa miskin diperlukan indikator untuk menentukan seseorang itu miskin. Indikator dari miskin tersebut, BPS (2008) menetapkan 8 penentuan kriteria rumah tangga miskin diantaranya adalah : Luas lantai per kapita <8 m, lantai adalah tanah, (dalam <http://daps.bps.go.id/File%20Pub/Analisis%20Kemiskinan%202008.pdf>). Dimana pelaksanaan penerima BSM tersebut untuk seluruh keluarga miskin. Kriteria penerima ada di buku pedoman pelaksanaan kebijakan BSM yang harus dipatuhi. Akan tetapi pelaksanaannya diprioritaskan untuk pemegang KPS. Pemegang KPS sebagian besar tidak tergolong kriteria miskin karena memiliki kondisi rumah bertembok dan beralas keramik.

*Kedua*, intervensi dalam implementasi kebijakan. Intervensi yang dilakukan pelaksana kepada kelompok sasaran dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi diberikan mengenai kegunaan dan manfaat dari BSM. Intervensi hanya dilakukan dengan sosialisasi seperti itu sehingga realisasi penggunaan dana bantuan siswa miskin tidak dapat

kendalikan, seperti untuk konsumtif maupun beli sepeda, karena orang tua yang lebih berkepentingan dalam menggunakan dana tersebut.

#### **E.1.4 Ketepatan Lingkungan**

Ketepatan lingkungan adalah kebijakan yang telah dibuat telah sesuai dengan lingkungan kebijakan, seperti interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah keterkaitan lembaga- lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lainnya, persepsi kelompok kepentingan akan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan sumber otoritas kebijakan.

Berdasarkan indikator tersebut dalam implementasi kebijakan BSM sudah berjalan optimal. Dimana keterkaitan antar lembaga pelaksana dengan lembaga lain melalui hubungan koordinasi yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian Persepsi dari individu masyarakat mendukung karena dapat membantu yang tidak punya. Persepsi dari lembaga strategis masyarakat memandang bahwa kebijakan dalam pendidikan yang ada sebelumnya hanya untuk membiayai fasilitas sekolah, sedangkan untuk kebutuhan personal siswa miskin tidak ada.

Sumber otoritas terletak pada pembuat kebijakan yaitu Kementerian Pendidikan. Otoritas diberikan ditandai dengan turunnya intruksi dalam mengoperasionalkan kebijakan BSM. Pemberian intruksi dalam menjalankan BSM harus jelas sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan BSM dapat terealisasi dengan optimal.

#### **E.1.5 Ketepatan Proses**

Ketepatan proses adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan proses di dalam implementasi kebijakan publik sehingga pelaksana kebijakan memahami tugas dan kelompok sasaran menerima dari kebijakan tersebut, dalam Riant Nugroho (2014: 688). Indikator dalam

ketepatan ini adalah kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan indikator tersebut masih terdapat belum optimal yaitu kesiapan masyarakat/ kelompok sasaran dalam menjalankan kebijakan BSM. Kesiapan masyarakat dalam menjalankan tergantung dari pemahaman kelompok sasaran yang dipengaruhi dari kondisi sosial dan ekonomi. Jika kondisi sosial dan ekonomi kelompok sasaran rendah, maka kelompok sasaran menganggap pemberian dana bantuan siswa miskin sebagai pendapatan. Oleh karena itu penggunaan dana tersebut ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari- hari, seperti membeli beras.

### **E.2. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin**

#### **E.2.1 Kepentingan Kelompok Sasaran**

Setiap kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran (Suwitri, 2009: 86). Indikator dari faktor ini adalah kebijakan yang telah ada sesuai dengan yang dibutuhkan kelompok sasaran dan penerimaan kelompok kepentingan akan kebijakan BSM.

Berdasarkan indikator kebijakan BSM telah sesuai dengan yang dibutuhkan kelompok sasaran menjelaskan bahwa kebijakan BSM sebagai bentuk penyelamatan siswa miskin kondisi kelompok sasaran yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari- hari sehingga berdampak pada pendidikan anak. Dengan adanya kebijakan ini dapat membantu kelompok sasaran dalam memenuhi kebutuhan personal siswa. Sedangkan penerimaan kelompok kepentingan adalah menyambut senang yang disampaikan oleh kelompok sasaran. Hal ini dikarenakan dengan adanya kebijakan BSM dapat memperbesar akses siswa miskin dalam memperoleh layanan pendidikan. Selain

itu kebijakan BSM perlu disempurnakan berupa pengendalian akan penggunaan dana yang dapat dilakukan sekolah.

### **E.2.2 Tipe Manfaat**

Adalah kebijakan yang dibuat memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena sangat mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target group/masyarakat banyak, dalam Sri Suwitri (2009: 86). Indikator dari faktor ini adalah manfaat secara ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat dirasakan kelompok sasaran.

Berdasarkan indikator tersebut terdapat manfaat yang belum optimal dirasakan kelompok sasaran sehingga memberikan dampak yang kurang baik kepada kelompok sasaran. indikator manfaat yang belum optimal dirasakan kelompok sasaran adalah manfaat secara sosial dan budaya. Pertama, manfaat secara sosial adalah menimbulkan kecemburuan sosial diantara kelompok sasaran. kedua, manfaat secara budaya adalah dapat menimbulkan ketergantungan dan budaya *meri* (iri) diantara kelompok sasaran.

### **E.2.3 Derajat Perubahan Yang Diinginkan**

Kebijakan yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya, tetapi jika sudah sekian tahun berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya dukungan dari masyarakat baru terlihat, dalam Sri Suwitri (2009: 87). Indikator dari faktor ini adalah perubahan jangka pendek yang dapat dirasakan dari adanya kebijakan dan perubahan jangka panjang yang dapat dirasakan dari adanya kebijakan.

Berdasarkan indikator tersebut perubahan yang dapat dilihat dan kurang optimal dengan dijalankannya kebijakan BSM adalah perubahan jangka pendek. Perubahan jangka pendek ini bisa

diketahui secara fisik berupa seragam, tas, dan sepatu yang digunakan oleh siswa miskin. Keseharian siswa miskin penerima bantuan masih terdapat yang menggunakan sepatu *robek*.

### **E.2.4 Letak Pengambilan Keputusan**

Adalah pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik yang tersebar, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi programnya. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat didalamnya, dalam Sri Suwitri (2009: 87). Indikator dari faktor ini adalah letak kedudukan lembaga pengambil keputusan dan proses pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan.

Berdasarkan indikator letak kedudukan lembaga pengambil keputusan bahwa Kebijakan BSM dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Di dalam membuat Kementerian Pendidikan melakukan konsolidasi dengan beberapa lembaga lain, seperti Dinas Sosial dan BPS. Sedangkan proses pengambilan keputusan bahwa keputusan BSM diambil oleh pusat melalui Kementerian Pendidikan. Di dalam membuat kebijakan dan menentukan kriteria BSM Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam membuat kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari kriteria penerima bantuan menggunakan kartu KPS.

### **E.2.5 Pelaksanaan Program**

Adalah kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan dari sebuah program. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program, dalam Sri Suwitri (2009: 87). Indikator dari faktor ini adalah kompetensi dari pelaksana kebijakan dan komunikasi antara pelaksana dengan para stakeholder.

Berdasarkan kompetensi dari pelaksana bahwa pengumpulan

kelompok sasaran merupakan cara yang tepat untuk diberikan sosialisasi mengenai persyaratan dalam melakukan pengambilan uangnya di bank yang telah ditunjuk, uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan siswa, dan kelompok sasaran juga harus mengetahui batas akhir pengambilan uang. Kemudian komunikasi yang dilakukan pelaksana hanya periode tertentu sehingga dapat mempengaruhi kejelasan dalam informasi yang diterima kelompok sasaran.

#### **E.2.6 Sumberdaya yang Dilibatkan**

Adalah tersedianya sumber- sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik, dalam Sri Suwitri (2009: 88). Indikator dari faktor ini adalah ketersediaan sumberdaya manusia, dana, dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan indikator tersebut masih terdapat yang belum optimal yaitu ketersediaan dana. Kebijakan Bantuan Siswa Miskin membutuhkan dana yang sangat besar karena pelaksanaan kebijakan ini adalah memberikan dana kepada kelompok sasaran untuk memenuhi kebutuhan sekolah personal siswa. Dana yang diberikan kepada kelompok sasaran untuk memenuhi kebutuhan sekolah personal siswa sebesar Rp450.000. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti tas, seragam, sepatu, maupun uang transportasi siswa. Selain itu juga masih banyak siswa miskin yang tidak mendapat bantuan BSM dikarenakan dana yang terbatas sehingga dalam melakukan verifikasi diprioritaskan yang menggunakan KPS. Dengan begitu ketersediaan sumberdaya dana yang mencukupi dalam menjalankan kebijakan BSM dapat mendukung keberhasilan tujuan dari kebijakan.

#### **E.2.7 Kekuasaan, Kepentingan, dan Aktor yang Terlibat**

Kedudukan kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat adalah proses implementasi yang akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya, dalam Sri Suwitri (2009: 88). Indikator dari faktor ini adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan BSM dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan indikator peran dari pemerintah daerah adalah memberi dukungan berupa kemudahan birokrasi dalam melakukan koordinasi dan peran dari pemerintah daerah juga melakukan pengawasan dengan meminta keterangan sudah sejauh mana pelaksanaan dari kebijakan tersebut sudah dilaksanakan. Kemudian strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan adalah sosialisasi untuk mendapat dukungan semua pihak. Strategi yang digunakan pelaksana juga dalam proses verifikasi usulan calon penerima bantuan siswa miskin adalah pemegang kps yang diprioritaskan.

#### **E.2.8 Karakteristik Lembaga**

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang berkepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan *who get what* atau “siapa mendapat apa”. Strategi penyelesaian konflik dapat secara tidak langsung menilai institusi dimana suatu program diimplementasikan, dalam Sri Suwitri (2009:88). Indikator dari faktor ini adalah dukungan dari pelaksana kebijakan, pemahaman pelaksana dan kelompok kepentingan akan mekanisme kebijakan BSM, dan koordinasi yang oleh para *stakeholder* dengan pelaksana dalam menjalankan kebijakan BSM.

Berdasarkan indikator tersebut masih terdapat yang belum optimal yaitu

koordinasi yang dilakukan pelaksana dengan para stakeholder dalam menjalankan kebijakan BSM. Pelaksanaan kebijakan Bantuan Siswa Miskin memerlukan koordinasi yang erat antar pelaksana dengan pihak berkepentingan. Di dalam melakukan koordinasi muncul kendala. Kendala yang dihadapi terletak pencairan dana yang sudah diambil kelompok sasaran atau belum. Situasi seperti ini yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaksana sehingga penggunaannya kurang dapat dipertanggungjawabkan.

### **E.2.9 Kepatuhan dan Dayatanggap**

Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementator harus tanggap terhadap kebutuhan- kebutuhan dari masyarakat/ kelompok sasaran, dalam Sri Suwitri (2009: 88). Indikator dari faktor ini adalah pemahaman pelaksana akan isi dan tujuan dari kebijakan, sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan, dan tingkat partisipasi dan tanggapan dari kelompok sasaran dari suatu kebijakan.

*Pertama*, pemahaman pelaksana akan isi dan tujuan dari kebijakan BSM tertuang dalam pedoman BSM yang berisi prosedur pelaksanaan kebijakan BSM mulai dari pengusulan sampai dengan pencairan satu mekanisme yang saling berkaitan. *Kedua*, sikap pelaksana kebijakan menyambut baik karena sudah menjadi bagian dari tugas pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan informasi kepada kelompok sasaran mengenai besarnya dana dan pemanfaatan dana sesuai dengan juknis. *Ketiga*, tingkat partisipasi dan tanggapan dari kelompok sasaran. Kebijakan BSM mendapat sambutan sangat baik dari kelompok sasaran. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi kelompok sasaran dari banyaknya usulan penerima yang masuk. Namun masih ada beberapa kelompok sasaran yang enggan berpartisipasi lantaran *gensis* untuk mengurus surat miskin, tetapi mereka masuk dalam kriteria penerima.

## **F. Penutup**

### **F.1 Kesimpulan**

Kebijakan Bantuan Siswa Miskin merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah dalam bidang pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan dari Kebijakan BSM sesuai dengan Panduan BSM adalah sebagai berikut: (1) menambah dan memperluas jumlah sasaran, (2) peningkatan jumlah nominal BSM untuk memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan kurang maksimal dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Siswa Miskin, yaitu Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin dan Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin
  - a. Ketepatan Kebijakan  
Ketepatan Kebijakan dalam kebijakan BSM masih belum optimal terutama dari upaya yang dilakukan pelaksana di level bawah baru mengajukan usulan siswa miskin dan kewenangan dalam menyeleksi calon penerima bantuan lebih diprioritaskan untuk pemegang KPS
  - b. Ketepatan Pelaksana  
Ketepatan pelaksana dalam implementasi kebijakan BSM masih belum optimal di lihat dari tugas yang diberikan yaitu menyampaikan realisasi penggunaan dana. Di dalam menjalankan tugas tersebut kewenangan yang diberikan belum maksimal.
  - c. Ketepatan Target  
Bahwa target kebijakan BSM adalah semua keluarga miskin. Namun pelaksanaannya belum optimal karena penerima lebih diprioritaskan kepada pemegang KPS yang tidak termasuk kriteria miskin. Selain itu intervensi kelompok sasaran yang dilakukan

- belum maksimal karena pemberian informasi tidak utuh, hanya besarnya dana pengenalan penggunaan dana
- d. Ketepatan Proses
 

Berdasarkan ketepatan proses dalam implementasi kebijakan BSM masih belum optimal terutama kesiapan kelompok sasaran dalam menjalankan kebijakan. Hal ini disebabkan penggunaan dana tersebut masih ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli beras
2. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi
    - a. Tipe Manfaat
 

Tipe manfaat yang dihasilkan dapat dilihat dari manfaat yang dihasilkan, ekonomi, sosial, dan budaya. Manfaat yang kurang maksimal dalam implementasi kebijakan BSM adalah sosial dan budaya karena menimbulkan kecemburuan antara kelompok sasaran.
    - b. Derajat Perubahan yang Diinginkan
 

Dapat dilihat dari perubahan jangka pendek yang belum optimal. Jangka pendek dilihat dari penampilan fisik siswa yang masih ada yang menggunakan sepatu yang *robek*.
    - c. Pelaksanaan Program
 

Di dalam pelaksanaan program Kebijakan BSM belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kejelasan informasi kurang sehingga kelompok sasaran kurang memahami isi dari kebijakan Bantuan Siswa Miskin.
    - d. Sumberdaya yang Dilibatkan
 

Sumberdaya yang dilibatkan adalah SDM, dana, dan fasilitas pendukung. Di dalam pelaksanaan BSM yang belum optimal adalah ketersediaan dana dalam kebijakan BSM. Dana

yang diberikan sebesar Rp450.000 belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pendidikan siswa yang mahal dan masih banyak siswa miskin yang tidak menerima bantuan.

- e. Karakteristik Lembaga
 

Berdasarkan karakteristik lembaga dalam implementasi kebijakan BSM belum maksimal. Hal ini terlihat dari parameter koordinasi dengan para *stakeholder*, kelompok sasaran, bahwa pengambilan dana dan penggunaan kelompok sasaran tidak melapor.

## F.2 Saran

Saran ini penulis dapatkan atas dasar pertimbangan yang terjadi di lapangan saat penelitian dilakukan. Saran ini sebagai masukan agar dapat memperbaiki yang belum optimal dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin
  - a. Ketepatan Kebijakan
 

Upaya yang dapat dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai dapat optimal adalah melakukan monitoring atau pengendalian dalam penggunaan dana tersebut. Selain itu Kementerian Pendidikan harus menyediakan mekanisme tersendiri kepada keluarga miskin yang tidak memegang KPS untuk dapat menerima BSM sesuai prinsip keadilan dan pemerataan.
  - b. Ketepatan Pelaksana
 

Di dalam menjalankan tugas, menyampaikan realisasi penggunaan dana, maka diperlukan kewenangan untuk mengendalikan penggunaan dana BSM
  - c. Ketepatan Penerima
 

Agar penerimaan bantuan siswa miskin tepat sasaran dan

- intervensi pemberian informasi yang utuh dalam mencapai tujuan kebijakan maka pelaksana harus bekerja sama dengan komite sekolah.
- d. Ketepatan Proses  
Kesiapan kelompok sasaran perlu diperlakukan khusus dalam penggunaan dana tersebut dengan cara komite sekolah sesekali mengunjungi kelompok sasaran untuk menanyakan penggunaan dana tersebut.
2. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi
    - a. Tipe Manfaat  
Sekolah harus memberikan pengertian kepada kelompok sasaran yang tidak menerima bahwa mereka yang tidak menerima juga sudah diusulkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial.
    - b. Derajat Perubahan yang Diinginkan  
Wali kelas memantau perubahan fisik anak muridnya yang menerima; dari sepatu sampai seragam; sehingga tingkat masuk siswa dan prestasi siswa dapat terus dipantau.
    - c. Pelaksanaan Program  
Kompetensi pelaksana di level bawah (sekolah) dalam memberikan kejelasan informasi kepada kelompok sasaran secara utuh, mulai dari bantuan tersebut berasal darimana, besarnya dana, diambilnya dimana, digunakan untuk apa, sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh oknum.
    - d. Sumberdaya yang Dilibatkan  
Dengan dana yang terbatas pemerintah harus membagi kouta penyaluran secara proporsional untuk pemegang KPS dan non-KPS. Selain itu jumlah dana yang diterima kelompok sasaran

disesuaikan dengan kenaikan peralatan kebutuhan sekolah.

- e. Karakteristik Lembaga  
Pelaksana kebijakan harus terus membuka komunikasi agar menjalin hubungan yang harmonis dengan kelompok sasaran maupun komite sekolah sebagai pihak *stakeholder*.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. (2014). *Panduan Bantuan Siswa Miskin: SD, SMP, SMA, dan SMK*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro Semarang.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### Sumber Lain:

Badan Pusat Statistik. 2008. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta: BPS (online, diakses pada tanggal 23 September 2015). <http://daps.bps.go.id/File%20Pub/Anali%20sis%20Kemiskinan%202008.pdf>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses tanggal 23 September 2014. <http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>